



# RENCANA KERJA

---

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

2022



# RENCANA KERJA

---

INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Renstra, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat tercapai.

Purwakarta, September 2021

**INSPEKTUR**

**Ir. H. Nurhidayat, M.M.**  
Pemoina Utama Muda/IV.c  
NIP 19640515 199203 1 008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Renstra, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat tercapai.

Purwakarta, September 2021

**INSPEKTUR**

**Ir. H. Nurhidayat, M.M.**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP 19640515 199203 1 008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Renstra, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat tercapai.

Purwakarta, September 2021

**INSPEKTUR**

**Ir. H. Nurhidayat, M.M.**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP 19640515 199203 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat.....	41
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>43</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>48</b>
4.1. Rencana Kerja .....	48
4.2. Pendanaan Indikatif.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Purwakarta.....	9
Tabel 2.2.	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	23
Tabel 2.4.	: Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta.....	29
Tabel 2.5.	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta.....	42
Tabel 3.2.	: Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.....	44
Tabel 4.1.	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiran Maju Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.....	50

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Profesional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensi dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum



untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan adalah salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun, serta Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam menunjang implementasikan kebijakan dengan menselaraskan sasaran strateginya khususnya aspek Pengawasan, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam visi Bupati Purwakarta terpilih yaitu **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** dimana visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dimana tema pembangunan daerah untuk tahun 2022 yaitu : **“MEMANTAPKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN”**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022,

yang mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional yaitu :

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan : 1) kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi dan 4) penegakan Integritas; dan
2. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor ; 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus dapat melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* (sebagai peringatan dini).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud tindak lanjut upaya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan yang diharapkan agar menjadi acuan terhadap serangkaian pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dituangkan kedalam 5 (lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut;

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan mereview pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) yang diuraikan sesuai dengan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan rencana kerja ditahun sebelumnya (2020) dapat di lihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah Tahun 2020 Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/8)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
4.02	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Pengawasan									
4.02.01	Inspektorat									
4.02.4.02.01.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana/prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%			



		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%			
		Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%			
4.02.4.02.01.01.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kualitas penyediaan surat menyurat kantor	100%	100%	100%	57%	57%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik kantor inspektorat daerah kab. Purwakarta	100%	100%	100%	56,37%	56,37%	-	-	-

4.02.4.02.01.01.07.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	25,23%	<b>25,23%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kualitas kebersihan kantor inspektorat daerah kab. Purwakarta	100%	100%	100%	90,00%	<b>90,00%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kualitas penyediaan ATK Inspektorat Daerah kab. Purwakarta	100%	100%	100%	99,89%	<b>99,89%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas ketersediaan barang cetak dan penggandaan yang memadai	100%	100%	100%	95,38%	<b>95,38%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	97,94%	<b>97,94%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas ketersediaan peralatan rumah tangga yang memadai	100%	100%	100%	80,36%	<b>80,36%</b>	-	-	-

4.02.4.02.01.01.07.17	Penyediaan Makanan dan Miuman	Meningkatnya kualitas ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	100%	100%	100%	99,37%	<b>99,37%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya kualitas hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	100%	84,79%	<b>84,79%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Meningkatnya kualitas kinerja tenaga PTT	100%	100%	100%	95,36%	<b>95,44%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.21	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kualitas kinerja tenaga piket malam	100%	100%	100%	90,00%	<b>90,00%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.29	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya ketersediaan asset/barang yang dibutuhkan	100%	100%	100%	99,34%	<b>99,34%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas gedung bangunan kantor Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	93,99%	<b>93,99%</b>	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas mutu asset yang dipelihara	100%	100%	100%	95,59%	95,59%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas mutu asset yang ada	100%	100%	100%	93,90%	93,90%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.63	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas kebutuhan dokumen Lakip yang diperlukan	100%	100%	100%	34,90%	34,90%	-	-	-

4.02.4.02.01.01.07.66	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya kualitas kebutuhan dokumen pelaporan akhir tahun yang diperlukan	100%	100%	100%	16,96%	16,96%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.70	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya kualitas kebutuhan dokumen Renja yang diperlukan	100%	100%	100%	96,00%	96,00%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.81	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%	100%	100%	43,51%	43,51%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.85	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Meningkatnya kualitas tenaga jasa cleaning service	100%	100%	100%	0%	0%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.95	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Meningkatnya pemahaman SPI	100%	100%	100%	0%	0%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.97	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Meningkatnya kualitas premi asuransi BPJS Kesehatan pegawai Non PNS	100%	100%	100%	49,56%	49,56%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.98	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Meningkatnya jumlah asset	100%	100%	100%	92,77%	92,77%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.99	Evaluasi MCP	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan evaluasi MCP	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
4.02.4.02.01.01.07.100	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan perencanaan perangkat daerah	100%	100%	100%	74,50%	74,50%	-	-	-

4.02.4.02.01.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Opini penilaian Sakip Kabupaten	100%	100%	88%	88%	88%	-	-	-
Opini penilaian LKPD Kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
Persentase penurunan temuan APIP terhadap OPD		100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
4.02.4.02.01.18.006.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran kegiatan SKPD	100%	100%	100%	92,70%	92,70%	-	-	-
4.02.4.02.01.18.08	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya ketersediaan dokumen kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	100%	73,69%	73,69%	-	-	-
4.02.4.02.01.18.09	Peningkatan Maturitas Level SPIP	Meningkatnya maturitas level SPIP Kabupaten Purwakarta	Level 3	Level 2	100%	-	-	-	-	-
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	B;90 opini; persen	B;90 opini; persen	-	-	-	B;90	B;90	B;90
6.01.01.2.02	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	C	-	-	-	3 Dokumen	-	0%

6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	-	0%
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	100%	-	-	-	-	14 Bulan	2 Bulan	100%
6.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	100%	-	-	-	-	1 Dookumen	-	100%
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan.triwulanan /semesteran SKPD	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	0	100%
6.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%
6.01.01.02.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang disusun	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%

6.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu dan jumlah pakaian olahraga yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	9 Stel/1 kegiatan	-	100%
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	100%	-	-	-	-	100%	-	100%
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	5 Item	-	100%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100%	-	-	-	-	2 Item	-	100%
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	12 Item	-	100%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Dibutuhkan	100%	-	-	-	-	8 Item	-	100%

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	7 Item	-	100%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	100%	-	-	-	-	100%	-	100%
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengadaan pendukung SPBE	100%	-	-	-	-	1 Item	-	100%
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Aset Barang Milik Daerah yang dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan roda 2 operasional pengawasan yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	3 unit	-	100%
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	350 Lembar	-	100%
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kenutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	4 Item	-	100%



6.01.0102.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	-	-	-	-	1 Item	-	100%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai Non PNS yang dibutuhkan	100%	-	-	-	-	14 orang	-	100%
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas asset barang milik daerah perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>1005</b>	<b>100%</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara/ditingkatkan/ditata	100%	-	-	-	-	22 Unit	0	100%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayarkan	100%	-	-	-	-	22 Unit	0	100%
6.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	100%	-	-	-	-	3 Item	-	100%
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada SKPD yang telah dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah pengawasan kinerja pemerintah daerah	100%	-	-	-	-	47 OPD	-	100%

6.01.02.02.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	47 OPD	24%	100%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen yang di reviu laporan kinerja	100%	-	-	-	-	3 Dokumen	-	100%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen yang direviu	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah kegiatan pengawasan desa	100%	-	-	-	-	183 Desa	-	100%
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan kinerja pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	1 Tahun	-	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	100%	-	-	-	-	2 kegiatan	-	100%
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Terlaksananya penanganan atas kasus kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah	100%	-	-	-	-	5 Kasus	-	100%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	-	-	-	-	7 Kasus	-	100%

6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	100%	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	100%
6.01.03.3.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan asistensi	100%	-	-	-	-	100%	1005	100%
6.01.03.3.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	100%	-	-	-	-	47 OPD	-	100%
6.01.03.3.02.02	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	100%	-	-	-	-	15 OPD	-	100%
6.01.03.3.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	100%	-	-	-	-	47 OPD	-	100%

6.01.03.3.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan integritas	100%	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%
-----------------	---	--	------	---	---	---	---	-----------	---	------

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2020 menerima alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 18.254.366.343 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan dengan besaran anggaran Rp. 11.744.450.343,- terealisasi Rp. 10.914.373.796,- atau 92.93%.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri dari 2 Program dan 34 Kegiatan Rp. 6.509.916.000,- terealisasi Rp. 5.831.146.995 atau 89.57%.

Capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023 ditahun pertama (2020) menunjukkan dari 29 indikator kinerja strategis dan 4 Indikator kinerja utama secara umum realisasi capaian kinerja dapat tercapai dan pada pelaksanaan ditahun kedua (2021) menunjukkan bahwa dari 34 indikator kinerja strategis dan 2 indikator kinerja utama secara umum realisasi capaian kinerja tidak terpenuhi hanya sampai dengan triwulan I, dari sisi pengangggaran untuk penanganan *covid 19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta akan melakukan pergeseran anggaran untuk pengadaan vaksin dan memfokuskan target kinerja pada penanganan kesehatan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2021 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah  
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta			Level 3	Level 3	Level3	Level 4	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	
2.	Persentase Penerapan SPIP pada Organisasi Daerah			12/46%	20/46%	24/46%	32/46%	15/46%	15/46%	24/46%	32/46%	

3.	Persentase Nilai Sakip Kategori Baik (B) pada Perangkat Daerah			18/46%	32/46%	36/46%	40/46%	20/46%	50/46%	36/46%	40/46%	
4.	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM			2/46%	4/46%	6/46%	8/46%	2/46%	4/46%	6/46%	8/46%	
5.	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) Yang Diselesaikan Rekomendasi			80%	90%	90%	100%	80%	90%	90%	100%	

6.	Persentase Penurunan Temuan Penyimpangan Terhadap APBD			8%	7%	6%	5%	6%	5%	6%	5%	
----	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 s.d 2022 diproyeksikan tercapai dari indikator yang telah ditargetkan, walaupun ada sebagai kecil indikator yang belum memenuhi target yaitu antara lain : Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat dan Jumlah Temuan BPK.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
4. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
5. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan implementasi SAKIP.
6. Minimnya SDM Pengawasan khususnya JFA dan JF P2UPD dan tenaga administrasi lainnya.
7. Minimnya SDM Pengawasan yang bersertifikat di bidang Investigasi.
8. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan.
9. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih terbatas.
10. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum tercapai.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Alokasi anggaran kegiatan (belanja langsung) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. **23.346.908.550,-** (*dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sekurang-kurangnya sebesar **0,50%** (*nol koma lima puluh persen*) dari APBD untuk Inspektorat Kab/Kota". Maka alokasi anggaran tersebut masih rendah/kurang. Akan tetapi, Inspektorat Daerah berupaya maksimal dan optimal untuk merealisasikan/mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD.

Terkait dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat dari Pimpinan KPK Nomor B/1803/LIT.05/10-15/02/2019 tentang Kerja Sama Survei Penilaian Integritas 2021, yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta dengan alokasi/kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 190.000.000,-** (*seratus sembilan puluh juta rupiah*). Terkait hal tersebut perlu pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut.

Untuk itu kami mengajukan usulan untuk alokasi dana/pagu indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sesuai dengan Rancangan Awal Rencana RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan penambahan anggaran untuk kegiatan Survei Penilaian Integritas dimaksud, dengan total usulan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebesar **Rp. 25.852.845.657,-** (*Dua*

*puluh lima milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).*

Secara lengkap dapat dilihat tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Purwakarta**

**Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Purwakarta</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>15.594.544.097</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Kab. Purwakarta</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>16.410.138.657</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dokumen	17.844.244	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	20.520.881	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	41.342.743	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	47.544.154
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12.188.783.455	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12.493.514.015
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Selesai Disusun	1 Dokumen	23.158.467	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Selesai Disusun	1 Dokumen	26.632.237
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Dokumen	40.880.131	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Dokumen	47.012.151
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>										

6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Yang dibutuhkan Untuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan BMD yang Selesai Disusun	6 Dokumen	18.323.147	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	21.071.992
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan BMD Yang Selesai Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	17.273.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Laporan BMD Yang Selesai Disusun dan Dilaporkan	5 Dokumen	19.863.950

#### Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Pakaian Khusus Inpektorat yang disediakan	65 Potong	241.416.235	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Pakaian Khusus Inpektorat yang disediakan	65 Potong	246.578.670
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Diklat Yang Diikuti Dalam Rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	5 Diklat	655.856.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Yang Diikuti Dalam Rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	5 Diklat	754.234.875

#### Administrasi Umum dan Perangkat Daerah

10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	10 Jenis	36.304.629	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	10 Jenis	41.750.324
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Presentasi Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Satu Tahun Terhadap Kenutuhan	100%	180.586.174	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Presentasi Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Satu Tahun Terhadap Kenutuhan	100%	207.674.101
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	65.596.024	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	75.435.428
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	171.180.534	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	196.857.614

14	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	193.553.050	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	222.586.008
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	168.360.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	100%	193.614.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Persentase Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	119.574.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Persentase Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi selama Satu Tahun Terhadap Kebutuhan	100%	137.510.905
17	Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta	Tersedianya Alat Untuk Memperkuat Penangkapan Sinyal WIFI Pada Komputer	2 Jenis	15.425.640	Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta	Tersedianya Alat Untuk Memperkuat Penangkapan Sinyal WIFI Pada Komputer	2 Jenis	17.739.486

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	5 Unit	96.141.150	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	5 Unit	110.562.323
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	2 Jenis	4.025.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	2 Jenis	4.628.750
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Terselesainya Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	129.278.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta	Terselesainya Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	148.670.160
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	58.891.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	67.725.225

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji/Tenaga Piket alam Dikantor Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji PTT Di Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi Pembayaran Premi ANgsuran BPJS Kesehatan Non BPJS yang Dibayarkan, Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Yang Dibutuhkan	12 Bulan, 12 Orang	749.198.550	Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji/Tenaga Piket alam Dikantor Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji PTT Di Inspektorat Daerah, Jumlah Frekuensi Pembayaran Premi ANgsuran BPJS Kesehatan Non BPJS yang Dibayarkan, Jumlah Petugas Kebersihan Kantor Yang Dibutuhkan	12 Bulan, 12 Orang	861.578.333
----	---	--------------------	--	-----------------------	-------------	---	--------------------	--	-----------------------	-------------

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/Dit ingkatkan/Dit ata	5 Unit	290.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/Dit ingkatkan/Dit ata	5 Unit	334.592.500
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dibayarkan Pajaknya	22 Unit	54.015.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dana Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dibayarkan Pajaknya	22 Unit	52.117.825
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Inspektorat Daerah	100%	43.585.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Inspektorat Daerah	100%	50.122.750

II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Purwakarta	Opini Penilaian Sakip Kabupaten; LKPD Kabupaten; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	BB;WTP	7.980.117.208	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Purwakarta	Opini Penilaian Sakip Kabupaten; LKPD Kabupaten; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	BB;WTP	8.397.467.998	
----	------------------------------------	-----------------	--	--------	---------------	------------------------------------	-----------------	--	--------	---------------	--

**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

26	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Kinerja	46 OPD	2.558.900.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Kinerja	46 OPD	2.642.735.000	Kegiatan Prioritas
27	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Keuangan	46 OPD	2.201.537.500	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Keuangan	46 OPD	2.252.100.674	Kegiatan Prioritas
28	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen yang di Reviu	5 Dokumen	224.250.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen yang di Reviu	5 Dokumen	257.887.500	Kegiatan Prioritas
29	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen yang di Reviu	4 Dokumen	32.775.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen yang di Reviu	4 Dokumen	37.691.250	Kegiatan Prioritas
30	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Desa yang dilakukan Audit	183 Desa	848.579.708	Pengawasan Desa	Kab. Purwakarta	Jumlah Desa yang dilakukan Audit	183 Desa	875.866.664	Kegiatan Prioritas

31	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Purwakarta	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Pelaksanaannya Bekerjasama dengan Tenaga Ahli	2 Jenis	17.250.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Purwakarta	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Pelaksanaannya Bekerjasama dengan Tenaga Ahli	2 Jenis	19.837.500	Kegiatan Priorita
32	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Purwakarta	Persentase Rekomendasi yang Telah Selesai di Tindak Lanjuti	80%	601.825.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Purwakarta	Persentase Rekomendasi yang Telah Selesai di Tindak Lanjuti	80%	692.098.750	Kegiatan Priorita
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>											
33	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kasus yang Selesai Ditangani	2 Kasus	17.250.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kasus yang Selesai Ditangani	2 Kasus	19.837.500	
34	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu	5 Kasus	1.477.750.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purwakarta	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu	5 Kasus	1.599.412.500	

III	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta		100%	993.290.562	Program Prumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purwakarta		100%	1.045.239.658
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>										
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiatan	34.145.297	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiatan	39.173.942
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>										
36	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Level 3	236.646.304	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Level 3	255.191
37	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Jmlah OPD yang Dilakukan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	14 OPD	462.897.687	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purwakarta	Jmlah OPD yang Dilakukan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	14 OPD	482.332.339
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Purwakarta	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai diatas 75% dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85%	59.601.274	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Purwakarta	Persentase OPD yang mendapatkan Nilai diatas 75% dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85%	68.541.465

39	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	20 OPD	200.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purwakarta	Jumlah OPD yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	20 OPD	200.000.000	Kegiatan Prioritas
----	---	-----------------	---	--------	-------------	---	-----------------	---	--------	-------------	--------------------

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah hanya lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan (wasmas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.5.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Khususnya pada Tugas-tugas di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
PERANGKAT DAERAH

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pengawasan secara nasional untuk Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Perencanaan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Dalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.

Adapun penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Mewujudkan Inspektorat Sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalnya Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Level 4
			2. Persentase Penerapan SPIP Pada OPD	32/46%
			3. Persentase Nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada OPD	40/46%
			4. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM	8/46%
			5. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang Diselesaikan Rekomendasi	100%
			6. Persentase Penurunan	4%

			Temuan Penyimpangan Terhadap APBD	
--	--	--	--	--

### 3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan terhadap pencapaian kinerja tahun 2021 terbagi dalam 3 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Program dan kegiatan inilah yang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Program dan kegiatan tersebut yaitu

#### 3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- III. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.3.2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3) Reviu Laporan Kinerja
  - 4) Reviu Laporan Keuangan
  - 5) Pengawasan Desa

- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- II. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3.3.3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- I. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- II. Pendampingan dan Asistensi
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Biroksi
  - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung menfaatkannya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun dunia usaha.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten/Kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan baik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

#### **4.2. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Renja Tahun 2022, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel pendanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta,



Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Purwakarta  
Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6 01	Inspektorat Daerah				24.567.951.867			25.852.845.653
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Sakip Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			15.594.544.097			16.410.138.657
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang disusun		4 Dokumen	59.186.987		4 Dokumen	68.065.035

6	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun	Purwakarta	2 Dokumen	17.844.244	APBD	2 Dokumen	20.520.881
6	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	2 Dokumen	41.342.743	APBD	2 Dokumen	47.544.154
6	01	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pengelolaan dan Penyediaan Administrasin Keuangan Kantor Yang Diperlukan</b>		<b>3 Item</b>	<b>12.252.822.053</b>		<b>3 Item</b>	<b>12.567.158.403</b>
6	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Purwakarta	12 Bulan	12.188.783.455	APBD	12 Bulan	12.493.514.015
6	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keunagan Akhir Tahun Yang Selesai Disusun	Purwakarta	1 Dokumen	23.158.467	APBD	1 Dokumen	26.632.237

6	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Purwakarta	3 Dokumen	40.880.131	APBD	3 Dokumen	47.012.151
6	01	01	2.03			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan</b>		<b>2 Kegiatan</b>	<b>35.596.471</b>		<b>2 Kegiatan</b>	<b>40.935.942</b>
6	01	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan BMD yang selesai disusun	Purwakarta	6 Dokumen	18.323.471	APBD	6 Dokumen	21.071.992
6	01	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang selesai disusun dan dilaporkan	Purwakarta	5 Dokumen	17.273.000	APBD	5 Dokumen	19.863.950
6	01	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>1 Kegiatan</b>	<b>870.272.735</b>			<b>1.000.813.545</b>
6	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakajian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakajian Khusus Inspektorat yang disediakan	Purwakarta	65 Potong	214.416.235	APBD	65 Potong	246.578.670

6	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Paratur Pengawas	Purwakarta	5 Diklat	655.856.500	APBD	5 Diklat	754.234.875
6	01	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Layanan Umum yang dilaksanakan</b>		<b>8 Kegiatan</b>	<b>950.580.751</b>		<b>8 Kegiatan</b>	<b>1.093.167.866</b>
6	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Purwakarta	10 Jenis	36.304.629	ABPD	10 Jenis	41.750.324
6	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase bketersediaan peralatan dan peralatan kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	180.586.174	APBD	100%	207.674.101
6	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	65.596.024	APBD	100%	75.435.428

6	01	01	2.06	04		Penyediaan Logistik Kantor	Bahan	Persentase ketersediaan logistic kantor selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	171.180.534	APBD	100%	196.857.614
6	01	01	2.06	05		Penyediaan Cetakan Penggandaan	Barang dan	Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	193.553.050	APBD	100%	222.586.008
6	01	01	2.06	08		Fasilitasi Tamu	Kunjungan	Persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	168.360.000	APBD	100%	193.614.000
6	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Koordinasi Konsultasi SKPD	Rapat dan	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun terhadap kebutuhan	Purwakarta	100%	119.574.700	APBD	100%	137.510.905

6	01	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya alat untuk memperkuat penangkapan sinyal wifi pada computer	Purwakarta	2 Jenis	15.425.640	APBD	2 Jenis	17.794.000
6	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan		3 Unit	96.141.150		3 Unit	110.562.32
6	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Pengawasan	Purwakarta	5 Unit	96.141.150	APBD	5 Unit	110.562.3
6	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Daerah yang dibutuhkan		3 Item	941.393.400		3 Item	1.082.602.4
6	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Purwakarta	2 Jenis	4.025.000	APBD	2 Jenis	4.628.75
6	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselesaikannya pembayaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purwakarta	4 Rekening	129.278.400	APBD	4 Rekening	148.670.16
6	01	01	2.08	03		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Purwakarta	1 Kegiatan	58.891.500	APBD	1 Kegiatan	67.725.225

6	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi Pembayaran Gaji PTT, Tenaga Piket Malam dan Tenaga Kebersihan Kantor	Purwakarta	12 Bulan	749.198.550	APBD	12 Bulan	861.578.333
6	01	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>		<b>56 Unit</b>	<b>388.550.500</b>		<b>56 Unit</b>	<b>446.833.07</b>
6	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dina Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	Purwakarta	5 Unit	290.950.000	APBD	5 Unit	334.592.50
6	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas/Operasional yang di Bayar Pajaknya	Purwakarta	22 Unit	54.015.500	APBD	22 Unit	62.117.82
6	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Inspektorat Daerah	Purwakarta	100%	43.585.000	APBD	100%	50.122.750

6	01	02				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan kepada SKPD yang telah dilaksanakan; opini Penilaian LKPD Kabupaten; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Insoektorat Kabupaten; Capaian SAKIP Kabupaten			7.980.117.208			8.397.467.338
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan		47 OPD	6.485.117.208		47 OPD	6.778.217.33
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Kinerja	Purwakarta	46 OPD	2.558.900.000	APBD	46 OPD	2.642.735.000
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan Keuangan	Purwakarta	46 OPD	2.201.537.500	APBD	46 OPD	2.252.100.674
6	01	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang di Reviu	Purwakarta	5 Dokumen	224.250.000	APBD	5 Dokumen	257.887.500



6	01	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen yang di Reviu	Purwakarta	4 Dokumen	32.775.000	APBD	4 Dokumen	37.193.250
6	01	02	2.01	05		Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang di Audit	Purwakarta	183 Desa	848.579.708	APBD	148 Desa	875.866.500
6	01	02	2.01	06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang pelaksanaanya bekerjasama dengan tenaga ahli	Purwakarta	2 Kegiatan	17.250.000	APBD	2 Kegiatan	19.837.500
6	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Jumlah Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti	Purwakarta	80 %	601.825.000	APBD	80%	692.098.750
6	01	02	2.02			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah kasus yang dilaksanakan terhadap penanganan, penyelesaian keuangan negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>		<b>12 kasus</b>	<b>1.495.000.000</b>		<b>12 Kasus</b>	<b>1.619.250.000</b>
6	01	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Negara yang Selesai Ditangani	Purwakarta	2 Kasus	17.250.000	APBD	2 Kasus	19.837.500

6	01	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	5 Kasus	1.477.750.000	APBD	5 Kasus	1.599.412.500
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Level Kapabilitas APIP, Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			983.290.562			1.045.239.658
6	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilirasi Pengawasan Inspektorat		1 Kegiatan	34.145.297		1 Kegiatan	39.173.942

6	01	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Purwakarta	1 Kegiatan	34.145.297	APBD	1 Kegiatan	39.173.942
6	01	03	2.02			<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Pengawasan Pendampingan dan Asistensi OPD</b>		<b>47 OPD</b>	<b>959.145.265</b>		<b>47 OPD</b>	<b>1.006.065.716</b>
6	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Purwakarta	Level 3	236.646.304	APBD	Level 3	255.191.912
6	01	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD Dilakukan Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Purwakarta	14 OPD	462.897.687	APBD	14 OPD	482.332.339
6	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Jumlah OPD Dengan Nilai Diatas 75% Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Purwakarta	85%	59.601.274	APBD	85%	68.541.465
6	01	01	2.02	04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang Dilakukan Survei Penilaian Integritas	Purwakarta	20 OPD	200.000.000	APBD	20 OPD	200.000.000

## BAB V PENUTUP

Sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang tersedia maka Renja ini juga menjadi bagian tahapan proses perencanaan tahunan yang berkelanjutan dan sistematis dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Renja ini kami berupaya untuk menelaah dan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selalu berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan sesuai visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu : **“Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa”**.

Demikian pula dalam pencapaian Sasaran, Strategis Organisasi, kami juga berupaya melalui Renja Tahun 2022 untuk mereviu Sasaran Kinerja agar memenuhi karakteristik, spesifik, terukur, jelas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan tepat waktu.

Purwakarta, September 2021

INSPEKTUR,

**Ir. H. Nurhidayat, M.M.**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19640515 199203 1 008